

Laporan Analisis Situasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat

Latar Belakang

Meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi, pendidikan karakter, serta penerapan inklusi sosial dan pendidikan perubahan iklim di sekolah merupakan langkah penting dalam membentuk masyarakat Indonesia yang cerdas, unggul, dan bertanggung jawab, sehingga mampu berkontribusi positif bagi bangsa. Upaya ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk mentransformasi pendidikan dan menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih baik, di mana seluruh pihak—siswa, guru, orang tua, pemangku kepentingan, dan masyarakat—dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan holistik siswa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia telah menunjuk Save the Children melalui Program KREASI (Kolaborasi untuk Edukasi Anak Indonesia) yang didanai oleh Global Partnership for Education (GPE) Multiplier Grant.



Dalam rangka merancang program yang mampu secara akurat memenuhi kebutuhan lokal, diperlukan diagnosis kontekstual terkait permasalahan di setiap wilayah. KREASI bekerja sama dengan Pusat

Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) untuk menganalisis situasi keterampilan dasar (numerasi, literasi, dan pembentukan karakter) serta perlindungan anak, termasuk pengarusutamaan GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dan pendidikan perubahan iklim dengan melakukan lokakarya konsultatif di delapan kabupaten di empat provinsi.

Studi kualitatif ini dilaksanakan pada bulan Maret hingga Juli 2024, menghasilkan beragam temuan, mulai dari praktik baik hingga tantangan dalam upaya meningkatkan transformasi pembelajaran yang sejalan dengan tujuan KREASI, yaitu memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

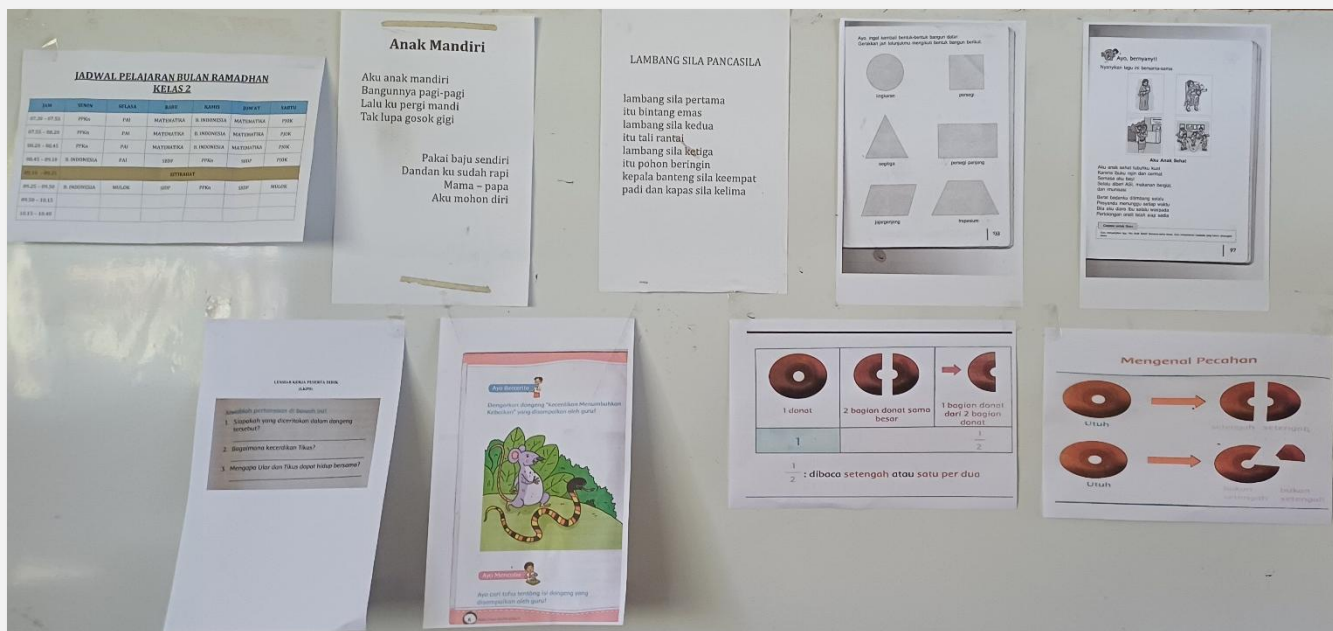
- Provinsi intervensi Program KREASI
- Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat



Kurikulum & Asesmen

Merdeka Belajar memiliki potensi besar untuk secara inklusif mentransformasi hasil pendidikan di Ketapang dan Kayong Utara. Namun, **implementasi Kurikulum Merdeka yang baru dimulai pada tahun 2023 memerlukan dukungan untuk memperkuat pemahaman prinsip-prinsipnya di tingkat sekolah.** Meski antusiasme guru untuk mempelajari kurikulum ini cukup tinggi, **diperlukan bimbingan tambahan** agar sekolah dapat sepenuhnya memahami konsep desain pembelajaran berbasis tujuan (*backward design*). Saat ini, rencana pembelajaran yang dibuat guru belum menunjukkan hubungan yang kuat antara tujuan pembelajaran, asesmen, dan metode yang digunakan.

Guru telah berusaha menerapkan teknik pembelajaran interaktif, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan meningkatkan pembentukan karakter siswa. Mereka juga menyadari keberadaan Platform Merdeka Mengajar (PMM). Namun, **banyak guru belum menyadari bahwa rencana pembelajaran yang tersedia di PMM dapat diakses dan diadaptasi untuk digunakan di kelas.** Pemanfaatan platform ini, terutama di awal implementasi Kurikulum Merdeka, dapat membantu guru menghemat waktu dalam pengembangan rencana pembelajaran sambil tetap mengikuti prinsip kurikulum.



Pemahaman guru tentang asesmen masih perlu ditingkatkan. Sebagai komponen penting dalam mengukur kemajuan dan pemahaman siswa, asesmen yang tidak tepat dapat menyebabkan kesenjangan hasil belajar. Sebagian sekolah telah melakukan asesmen pada awal proses pembelajaran untuk mengidentifikasi gaya belajar dan kompetensi siswa. Namun, masih terdapat kesalahpahaman umum mengenai gaya belajar, di mana banyak yang percaya bahwa setiap siswa memiliki satu gaya dominan (visual, auditori, atau kinestetik) dan mengajar sesuai gaya tersebut akan meningkatkan hasil belajar. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan lebih lanjut tentang asesmen yang berbasis bukti.

Dalam hal **dokumentasi perkembangan siswa**, beberapa sekolah meminta guru untuk mencatat kemajuan siswa. Namun, catatan ini **belum digunakan secara maksimal untuk menyesuaikan metode pengajaran.** Beberapa sekolah tidak memiliki mekanisme pencatatan perkembangan siswa, sementara catatan yang ada cenderung hanya fokus pada siswa yang menghadapi masalah tanpa diterjemahkan menjadi strategi pengajaran yang relevan.

Komunitas belajar profesional seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS) sudah ada, tetapi kualitas dan waktu pertemuan mereka masih memerlukan peningkatan. **Pemerintah perlu mendukung kelompok-kelompok ini untuk mendorong sesi perencanaan pembelajaran kolaboratif**, di mana guru dapat berbagi ide, sumber daya, dan umpan balik. Hal ini penting untuk menumbuhkan budaya kolaborasi dan inovasi di kalangan pendidik.

Akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, termasuk penyandang disabilitas, telah diatur dalam regulasi perlindungan anak. Sekolah luar biasa (SLB) baik negeri maupun swasta tersedia di Ketapang dan Kayong Utara. **Namun, data tentang sekolah inklusif belum ditemukan, dan analisis menunjukkan bahwa strategi pendidikan inklusif saat ini masih belum memadai.** Diperlukan dukungan untuk membantu sekolah melakukan skrining dini, asesmen kebutuhan khusus, serta observasi siswa. Komunikasi dengan orang tua juga harus diperkuat untuk mengidentifikasi potensi kebutuhan khusus dan memberikan dukungan yang tepat.

Dalam konteks perubahan iklim, penting untuk mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum dan sistem sekolah. Program sekolah Adiwiyata yang digagas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan siswa. Selain itu, **beberapa LSM seperti Pongo Ranger dan Yayasan Alam Lestari telah bekerja sama dengan sekolah untuk mengedukasi siswa tentang perubahan iklim.** Kolaborasi ini memiliki potensi besar untuk membantu sekolah mengintegrasikan isu-isu seperti kebakaran hutan, penambangan, kepunahan Orangutan, dan spesies terancam lainnya akibat perubahan iklim ke dalam pembelajaran di kelas.

Akhirnya, **jumlah guru di kedua kabupaten ini masih belum memenuhi standar yang dipersyaratkan.** Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi, baik untuk program sertifikasi guru maupun melanjutkan studi di universitas lokal atau Universitas Terbuka. Langkah ini penting untuk meningkatkan kualitas guru dan memastikan mereka memiliki kualifikasi yang memadai untuk mengajar di sekolah.

Praktik Pengajaran

Guru di Ketapang dan Kayong Utara telah menerapkan pembelajaran terdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek, dan **Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5)**. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM), asesmen formatif, strategi pendidikan inklusif, serta integrasi kegiatan pembelajaran dengan isu perubahan iklim.



Dalam mendukung pembelajaran terdiferensiasi, **guru telah melakukan asesmen diagnostik untuk mengukur kesiapan siswa dan mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar serta minat mereka.** Namun, pemahaman guru terhadap konsep asesmen formatif masih perlu diperkuat. Asesmen formatif sangat penting untuk memantau kemajuan siswa dan

menyesuaikan strategi pengajaran agar lebih efektif. Saat ini, guru sering fokus pada hasil akhir daripada proses belajar siswa, terutama dalam implementasi P5. Paradigma ini perlu bergeser untuk lebih

menekankan proses pembelajaran, dengan menggunakan indikator dan rubrik yang tersedia di PMM untuk melacak perkembangan siswa dalam menginternalisasi nilai-nilai Pancasila.

Sebagian besar guru berada dalam tahap awal pemahaman prinsip Kurikulum Merdeka, sehingga perlu didukung dalam menggunakan PMM. **Banyak guru yang belum menyadari bahwa mereka tidak diwajibkan membuat rencana pembelajaran sendiri dari awal.** PMM menyediakan berbagai contoh rencana pembelajaran yang dapat diadaptasi untuk menghemat waktu dan membantu guru lebih fokus pada penerapan strategi pengajaran yang inovatif.

Evaluasi kinerja guru telah dilakukan melalui sistem e-Kinerja dan PMM dengan supervisi dari pengawas sekolah dan kepala sekolah. Meski demikian, evaluasi ini harus lebih diarahkan untuk membantu guru mengintegrasikan pendidikan inklusif dan perubahan iklim dalam praktik pengajaran mereka. Pendidikan inklusif memerlukan strategi yang mendukung siswa dengan kebutuhan khusus, sementara pendidikan perubahan iklim perlu diintegrasikan dalam aktivitas belajar untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang isu lingkungan.

Wilayah Kalimantan Barat yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti orangutan, bekantan, beruang madu, dan berbagai jenis burung, menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia. **Guru memahami pentingnya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tetapi sering kali kekurangan ide untuk mengintegrasikan isu ini ke dalam pembelajaran.** Aktivitas seperti program kebersihan sekolah telah dilakukan, tetapi guru mengalami kesulitan menghubungkannya dengan konteks perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan dan sumber daya yang relevan untuk membantu guru mengaitkan kegiatan sehari-hari dengan dampak perubahan iklim, seperti kebakaran hutan dan kepunahan spesies.

Selain itu, **penting untuk memperkuat kemampuan guru dalam menjadikan pembelajaran lebih relevan dengan konteks lokal.** Guru dapat mengembangkan proyek pembelajaran yang menghubungkan isu-isu lingkungan, seperti keberlanjutan hutan dan ekosistem sungai, dengan nilai-nilai Pancasila dan profil pelajar yang diharapkan. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kualitas pembelajaran tetapi juga mempersiapkan siswa menjadi generasi yang sadar lingkungan dan inklusif.

Kepemimpinan Pendidikan

Kepala sekolah di Ketapang dan Kayong Utara telah menunjukkan praktik baik dalam pengembangan kurikulum, kolaborasi dengan organisasi pendidikan lingkungan, pembelajaran berpusat pada anak, dan penguatan profesionalisme guru. Mereka memimpin pelaksanaan program literasi, inisiatif konservasi, dan pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan. Selain itu, kepala sekolah memprioritaskan pengembangan profesional guru melalui pelatihan, alokasi anggaran, dan penilaian kinerja, serta telah membentuk Komite Perlindungan dan Keamanan Anak.

Namun, analisis aspek kepemimpinan pendidikan di kedua kabupaten ini mengungkapkan **beberapa area yang memerlukan perhatian dan peningkatan:**

1. **Kompetensi Kepemimpinan dan Pengembangan Profesional**
Kompetensi kepemimpinan kepala sekolah perlu ditingkatkan, terutama dalam kemampuan berkolaborasi untuk mengembangkan program berbasis rapor pendidikan dan menyinkronkan program pendidikan dengan kebutuhan lokal. **Banyak kepala sekolah yang membutuhkan pelatihan dan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka,** termasuk kemampuan untuk memimpin perubahan, merancang strategi berbasis data, dan membangun budaya kolaborasi yang kuat di sekolah mereka.

2. Praktik Reflektif dalam Kepemimpinan

Praktik reflektif belum sepenuhnya menjadi bagian dari budaya kepemimpinan di sekolah-sekolah di Ketapang dan Kayong Utara. Meskipun pertemuan KKKS (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) diadakan setiap bulan, refleksi belum menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan dan pengembangan sekolah. **Kepala sekolah perlu didorong untuk mengintegrasikan refleksi dalam proses kepemimpinan** mereka guna meningkatkan efektivitas dan hasil yang lebih baik. Forum komunitas belajar bagi kepala sekolah harus lebih difokuskan pada berbagi pengalaman, tantangan, dan strategi, menciptakan ruang untuk pembelajaran kolaboratif.

3. Komitmen terhadap GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial)

Meskipun kebijakan penerimaan siswa secara umum telah menerima siswa dari berbagai latar belakang sosial ekonomi, pelatihan tentang **metode pengajaran inklusif belum tersedia di banyak sekolah.** Hal ini memengaruhi kemampuan guru dalam mempersiapkan strategi pembelajaran yang efektif untuk siswa dengan kebutuhan beragam, terutama siswa berkebutuhan khusus. Kepala sekolah perlu memastikan bahwa prinsip GEDSI menjadi bagian integral dari kebijakan dan praktik sekolah.

4. Penguatan Regulasi Kepemimpinan Pendidikan

Regulasi yang mengatur kepemimpinan pendidikan di kedua kabupaten ini membutuhkan penguatan. **Kesenjangan atau inkonsistensi dalam regulasi dapat berdampak pada kualitas keseluruhan kepemimpinan di sekolah.** Pengembangan kebijakan yang lebih komprehensif dan konsisten diperlukan untuk memastikan kepala sekolah memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka.

Selain itu, isu perubahan iklim juga perlu menjadi bagian dari agenda kepemimpinan pendidikan. Kepala sekolah dapat berperan dalam mengintegrasikan pendidikan perubahan iklim ke dalam kurikulum sekolah dan mendorong kolaborasi dengan organisasi lingkungan untuk mengedukasi siswa tentang dampak perubahan iklim, konservasi keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan lingkungan. Langkah ini tidak hanya mendukung pembelajaran berbasis konteks lokal tetapi juga mempersiapkan siswa menjadi generasi yang sadar lingkungan.

Perlindungan Anak

Sekolah-sekolah di Ketapang dan Kayong Utara telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan manajemen kekerasan terhadap anak melalui berbagai inisiatif, seperti pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan (TPPK). Upaya ini mencerminkan pemahaman sekolah terhadap regulasi perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Namun, masih diperlukan penguatan dalam penegakan prosedur dan kebijakan perlindungan anak untuk memastikan efektivitasnya dalam melindungi anak-anak dari berbagai bentuk bahaya.

Analisis menunjukkan bahwa **mitigasi kasus kekerasan terhadap anak perlu diperkuat dengan langkah-langkah proaktif yang berfokus pada pencegahan dan intervensi dini.** Hal ini mencakup identifikasi risiko, pemantauan, serta respons yang cepat terhadap kasus kekerasan. Selain itu, **penting untuk mengevaluasi kesalahpahaman dalam pengajaran**



perlindungan tubuh (*body protection*) di sekolah. Anak-anak harus menerima informasi yang akurat dan sesuai usia mengenai cara melindungi diri mereka dari ancaman.

Pemerintah daerah di Ketapang dan Kayong Utara telah menunjukkan komitmen terhadap perlindungan anak melalui kebijakan yang mencakup pendidikan karakter dan inklusi sosial. Namun, **pelaksanaan kebijakan ini memerlukan langkah konkret untuk memastikan dampak yang nyata**. Alokasi sumber daya yang memadai, kebijakan yang komprehensif, dan pengawasan implementasi inisiatif perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting.

Lebih jauh, **kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk LSM dan komunitas lokal, dapat membantu memperkuat pendekatan perlindungan anak**. Misalnya, pelatihan untuk tenaga pendidik mengenai manajemen kasus kekerasan dan pengintegrasian nilai-nilai inklusi sosial dalam kegiatan pembelajaran dapat memberikan dampak positif yang signifikan.

Pendidikan perubahan iklim juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat perlindungan anak. **Dengan meningkatkan kesadaran siswa tentang risiko lingkungan, seperti bencana akibat perubahan iklim, sekolah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tanggap terhadap risiko**.

Untuk memperkuat perlindungan anak secara menyeluruh, penting bagi pemerintah daerah untuk membangun kapasitas tenaga pendidik dan pengambil kebijakan di sektor pendidikan. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan, pengawasan dan evaluasi implementasi kebijakan, serta peningkatan partisipasi komunitas dalam program perlindungan anak.

Usulan Solusi

Kurikulum dan Asesmen:

1. Pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya untuk program pengembangan profesional bagi pemangku kepentingan pendidikan.
2. Memberikan bimbingan teknis tentang asesmen dan Kurikulum Merdeka dengan memanfaatkan narasumber dari pengawas sekolah, guru penggerak, BPGP, BPMP, atau praktisi pendidikan.
3. Menghidupkan kembali komunitas belajar profesional sebagai tempat bagi guru dan pemimpin sekolah untuk belajar mandiri, berbagi, dan berkolaborasi.
4. Memperkuat kapasitas terkait pendidikan inklusif dan perubahan iklim melalui kolaborasi dengan LSM yang peduli terhadap isu inklusif dan lingkungan.
5. Membangun jaringan dengan aktivis literasi untuk memperkuat ekosistem pendidikan melalui kegiatan literasi berbasis masyarakat.

Praktik Pengajaran:

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada guru untuk memanfaatkan PMM atau PINTAR dalam kegiatan pembelajaran, termasuk membantu guru di daerah terpencil seperti Kecamatan Simpang Hulu menggunakan “Awan Penggerak.”
2. Membentuk komunitas belajar profesional bagi guru untuk mempelajari prinsip-prinsip Kurikulum Merdeka, membantu siswa berkebutuhan khusus, dan memfasilitasi kolaborasi dengan pakar pendidikan inklusif.

3. **Meningkatkan kolaborasi dengan LSM** untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk mengembangkan bahan ajar untuk guru dan siswa.

Kepemimpinan Pendidikan:

1. **Bappeda memimpin refleksi program pendidikan bersama pemangku kepentingan** dan mengembangkan perencanaan bersama berbasis data yang sesuai dengan kondisi lokal.
2. **Mengorganisasi pengembangan profesional untuk pemimpin pendidikan, terutama terkait rapor pendidikan**, guna mendukung pengambilan keputusan berbasis data.
3. **Mengalokasikan sumber daya untuk pelatihan pendidikan inklusif bagi guru** untuk meningkatkan kompetensi terkait GEDSI.
4. **Mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan regulasi tentang kepemimpinan pendidikan** dan melibatkan pemangku kepentingan dalam prosesnya.

Perlindungan Anak:

1. **Memberikan pendampingan dan bimbingan teknis tentang tugas TPPK** untuk meningkatkan efektivitas penegakan perlindungan anak.
2. **Mendorong kontribusi Bappeda untuk memastikan perlindungan anak masuk dalam dokumen perencanaan daerah**, serta dukungan dari Dinas Pendidikan melalui dana BOS dan program sekolah.
3. **Mengembangkan SOP manajemen kasus yang didukung oleh optimalisasi kinerja TPPK**, serta memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pentingnya memahami hukum terkait kekerasan anak.
4. **Memberikan pengembangan profesional kepada guru dan pemangku kepentingan utama tentang perlindungan anak.**
5. **Berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi regulasi perlindungan anak yang komprehensif.**